



IMPLIKASI AUKUS TERHADAP HUBUNGAN EKONOMI AUSTRALIA DAN TIONGKOK TAHUN 2021-2022

Fajar Oktavianto

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Satya Negara Indonesia

Surel: fajarsurya0112@gmail.com

Tanggal pengiriman: 25 Januari 2023 | Tanggal revisi: 31 Agustus 2023 | Tanggal diterima: 10 September 2023

ABSTRACT

This research analyzes economic relations between China and Australia after Australia joined defense technology cooperation AUKUS. The United States, United Kingdom, and Australia established AUKUS to contain China in Indo-Pacific, which is the center of world economics and geopolitics today. This research, therefore, aims to discuss the impact of AUKUS towards economic relations between China and Australia in 2021 and 2022. Using a qualitative research method and Kenneth Waltz's neorealism theory and national interest concept, the author found that Australia's foreign policy to become AUKUS member worsened its economic relations with China. In 2021, China suspended the entry of import commodities from Australia to politically retaliate Australia. By banning Australia's commodities, China not only sought to attack Australian trade, but also defended its national interests in state sovereignty, national security, and territorial integrity.

Keywords: Australia, China, Economy, National Interest, Neorealism

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Australia setelah Australia bergabung dalam kerja sama teknologi pertahanan AUKUS. Amerika Serikat, Inggris, dan Australia mendirikan AUKUS untuk membendung kekuatan Tiongkok di Indo-Pasifik, yang merupakan pusat ekonomi dan geopolitik dunia saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas dampak pembentukan AUKUS terhadap hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Australia pada 2021 dan 2022. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori neorealisme Kenneth Waltz dan konsep kepentingan nasional, penulis menemukan bahwa kebijakan luar negeri Australia untuk menjadi anggota AUKUS semakin memperburuk hubungan ekonominya dengan Tiongkok. Pada tahun 2021, Tiongkok menangguhkan masuknya komoditas impor dari Australia sebagai bentuk pembalasan Tiongkok secara politis untuk menurunkan nilai perdagangan Australia. Dengan melarang komoditas Australia, Tiongkok tidak hanya berusaha menyerang sektor perdagangan Australia, tetapi juga membela kepentingannya nasionalnya dalam konteks kedaulatan negara, keamanan nasional, dan integritas teritorial.

Kata Kunci: Australia, Tiongkok, Ekonomi, Kepentingan Nasional, Neorealisme

LATAR BELAKANG

Istilah Indo-Pasifik makin sering digunakan dalam dimensi geoekonomi dan keamanan sejak awal abad ke-21. Hal itu, misalnya, ditandai dengan meningkatnya ketegasan kebijakan politik-militer Tiongkok dengan strategi *String of Pearls* pada tahun 2005. Istilah Indo-Pasifik semakin diperbincangkan setelah Amerika Serikat membuat kebijakan *Pivot to Asia*. Melalui kebijakan ini, Amerika mulai memberikan fokus utama pada kawasan Indo-Pasifik untuk memenuhi tujuan geopolitik dan kebijakan luar negerinya di Asia (Bo, 2014; Kuo, 2018).

Saat ini, kawasan Indo-Pasifik menjadi sebuah kawasan strategis yang merangkap aspek geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi ke dalam satu pemahaman. Istilah ini melibatkan kedua samudera tersebut sebagai zona maritim yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, pertahanan, ekonomi, serta mengedepankan kepentingan maritim. Faktanya, Tiongkok berpengaruh besar di dalam Indo-Pasifik. Hal tersebut dibuktikan atas pertumbuhan ekonomi rentang tahun 1978-2003 mencapai 9,7%. Jika dibandingkan Jepang, berbanding jauh selisihnya, sekitar 8,5% (Yadav, 2022; Pedrason, 2021; Ulung, 2010).

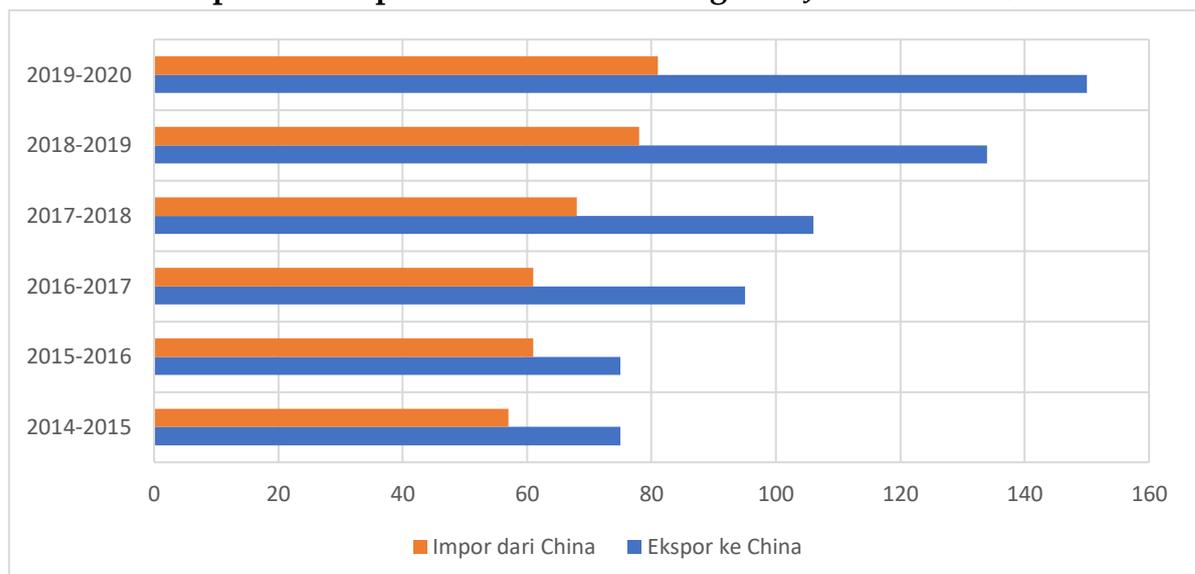
Bank Dunia pada 1978-2005 mencatat sekitar 402 juta penduduk Tiongkok bebas dari garis kemiskinan. Sejak tahun 1979 atau sejak reformasi ekonomi Tiongkok, para investor berlomba-lomba berinvestasi di Tiongkok yang menghasilkan barang-barang Tiongkok membanjiri pasar internasional. Pemasukan negara yang terima Tiongkok juga diikuti dengan modernisasi militer dan bergabungnya Tiongkok di berbagai institusi Internasional. Hingga saat ini, fenomena *The Rising of China* atau kebangkitan Tiongkok terus menjadi bahan pembicaraan (Ulung, 2010).

Kebangkitan Tiongkok yang dimaksud seperti berikut; Pertama, pertumbuhan ekonomi Tiongkok menjadi yang tidak tertandingi pasca reformasi ekonomi sejak tahun 1979. Kedua, Tiongkok mulai gencar memodernisasi militernya dengan tujuan memiliki kekuatan yang lebih efisien, kejam, dan efektif yang didorong atas

kebangkitan ekonomi, teknologi, dan kemandirian militernya. Pada tahun 2020, pengeluaran pertahanan Tiongkok mencapai US\$ 252 miliar. Angka tersebut menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan pengeluaran pertahanan terbesar kedua di dunia. Ketiga, Tiongkok adalah pusat manufaktur dunia serta importir minyak dan gas terbesar di dunia. Untuk memaksimalkan pasar ekspornya, Beijing membangun infrastruktur, konektivitas regional, dan menciptakan saling ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, pada tahun 2013 Presiden Xi Jinping membentuk kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) (Dev, 2022).

Di sisi lain, Australia adalah salah satu anggota dari negara persemakmuran Inggris di kawasan Asia. Walaupun memiliki pemikiran 'Barat', para pemimpin Australia telah memahami bahwa masa depan Australia tergantung oleh letak geografisnya. Dalam urusan ekonomi, Australia menempatkan Tiongkok sebagai mitra dagangnya. Kebangkitan Tiongkok menghasilkan peningkatan perekonomian bagi Australia. Seperti pada antara tahun 1977-1984, perdagangan kedua negara tumbuh 12% (US\$ 500 juta ke US\$ 1,2 miliar) (Grant, 2022; Ulung, 2010).

Grafik 1.
Ekspor dan Impor Australia dan Tiongkok (Juta Dolar AS)



Sumber: (Australian Bureau of Statistics, 2020)

Mitra dagang Tiongkok-Australia cukup tinggi dalam ekspor dan impor berupa barang dan jasa. Pada beberapa tahun terakhir, pertumbuhan perdagangan keduanya masih naik cukup signifikan (Grafik 1). Terlihat sejak tahun 2014 sampai 2019, nilai ekspor Australia ke Tiongkok mendapatkan persentase kenaikan tahunan sebesar 42.11%. Sedangkan dengan tahun yang sama, untuk nilai impor Australia dari Tiongkok mendapatkan kenaikan tahunan sebesar 100%. Peningkatan perdagangan ini juga menjadi kerja nyata dari penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas antara Tiongkok-Australia (ChAFTA) sejak Desember 2015 lalu (Australian Bureau of Statistics, 2020).

Menurut penulis perkembangan kemitraan Tiongkok dan Australia menarik untuk dibahas, karena kebijakan luar negeri Australia memiliki aspek yang menarik. Pada bidang keamanan dan pertahanan, Australia lebih berpihak kepada Amerika Serikat sedangkan dalam urusan ekonominya lebih berpihak kepada Tiongkok. Bahkan, Australia dan Tiongkok sepakat untuk menggambarkan hubungan mereka sebagai *comprehensive strategic partnership*. Selama berhubungan diplomatik, belakangan ini kedua negara mengalami kompleksitas dalam politiknya (Australian Government, 2022).

Pada artikel ini, penulis berusaha menganalisis dampak ekonomi pasca pembentukan AUKUS terhadap hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Australia. Maka penulis mengangkat pertanyaan masalah: “Bagaimana dampak bergabungnya Australia ke dalam AUKUS terhadap hubungan ekonomi Tiongkok dan Australia? Di dalam bab diskusi, penulis akan menjelaskan empat hal. Pertama, penulis akan menjelaskan dinamika hubungan bilateral antara Tiongkok dan Australia. Kedua, penulis akan menjelaskan ketegangan politik antara Tiongkok dan Australia. Ketiga, penulis akan menjelaskan pembentukan kerja sama teknologi pertahanan AUKUS. Keempat, penulis akan menjelaskan dampak pembentukan AUKUS terhadap hubungan perdagangan Tiongkok dan Australia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada tulisan ini, penulis akan menggunakan teori neorealisme dan konsep kepentingan nasional. Menurut penulis, hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Australia pada kasus ini dapat dianalisis dengan teori neorealisme dan konsep kepentingan nasional. Neorealisme merupakan turunan dari teori Realisme. Neorealismenya Kenneth Waltz (1979), hadir sebagai respon dari pemikiran Hans Morgenthau yang menulis realisme klasik. Paradigma neorealisme dianggap '*dominant school of thought*' pada bukunya Waltz yang berjudul *Theory of International Politics* (1979). Menurut Waltz, realisme klasik terlalu menekankan aspek sifat dasar manusia sebagai asal mula perang, karena menurut Morgenthau sifat asli manusia adalah jahat, brutal, dan suka berperang. Waltz menambahkan bahwa teori hubungan internasional yang bagus adalah teori yang fokus kepada; bagaimana sistem dunia terbentuk, bagaimana negara-negara saling berinteraksi, dan bagaimana sistem dunia itu sementara atau permanen (Rosyidin, 2020; Jackson & Sorensen, 2013; Keohane, 1988; Ulung, 2012).

Waltz juga menambahkan teorinya menghindari referensi mengenai manusia yang mengejar kekuasaan sebagai tujuan, namun lebih menjadi sebagai sarana dan keamanan adalah tujuannya dengan melalui *balancing* dan *bandwagoning*. Jadi, neorealisme tidak dimaksudkan sebagai teori kebijakan luar negeri, namun lebih ke teori sistemik yang diarahkan untuk menganalisis perilaku negara. (Rosyidin, 2020; Bakry, 2019).

Penulis juga menggunakan konsep kepentingan nasional. Menurut Umar S. Bakry (2017) pada bukunya, kepentingan nasional merupakan cara atau alat terbaik untuk menganalisis diplomasi dan kebijakan luar negeri negara lain, baik dalam kondisi bersahabat ataupun memanas di antara kedua atau lebih negara tersebut. Hampir semua aktivitas analisis diplomasi dan kebijakan luar negeri suatu negara menyinggung masalah kepentingan nasional (Bakry, 2019).

Sedangkan menurut Morgenthau (1948), kepentingan nasional adalah tujuan negara dalam hubungan internasional. Tujuan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan. Kekuasaan membuat negara berpikir dengan disiplin dan logis. Kekuasaan juga dapat membuat negara untuk memahami politik secara teoritis. Konsep tersebut membuat negara berpikir dan bertindak dengan rasional serta membuat kebijakan luar negeri negara tetap sama meskipun terdapat perbedaan. Konsep tersebut tidak peduli dengan alasan, keinginan, atau moral para pemimpin negara (Morgenthau & Thomson, 2010).

Menurut Scott Burchill (2005), kepentingan nasional menjadi pusat pengambilan keputusan. Burchill berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan kepentingan nasional, penilaian subjektif tidak dapat dihindari. Artinya mengevaluasi suatu subjek berdasarkan persepsi, penilaian, dan analisis dari individu atau kelompok. Hal tersebut merupakan tantangan terhadap klaim kaum realis klasik bahwa kepentingan nasional dapat diidentifikasi sebagai tujuan yang menentukan pengimplementasian kebijakan luar negeri negara. Namun menurut Rosenau (1964), konsep kepentingan nasional dibagi dua cara. Pertama, kepentingan nasional digunakan untuk membentuk perilaku politik sebagai alat mempertahankan, menentang, atau mengusulkan kebijakan. Kedua, kepentingan nasional digunakan oleh para akademisi hubungan internasional sebagai alat analisis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menilai kecukupan kebijakan luar negeri negara. (Burchill, 2005).

Setelah melihat beberapa definisi pada paragraf-paragraf sebelumnya, penulis berpendapat bahwa dalam perspektif neorealisme di mana mereka menekankan peran kekuatan dan keamanan dalam sebuah perilaku negara. Namun, untuk mengejar kekuatan dan keamanan tersebut digunakanlah konsep kepentingan nasional. kepentingan nasional merupakan cara komunikasi dan mengevaluasi melalui kebijakan luar negeri dalam mempertahankan negaranya atau negara lain.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Taylor dan Bogdan (1984), metode kualitatif adalah penelitian yang membuahkan data deskriptif mengenai kata-kata baik lisan atau tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari variabel atau target yang diteliti. Sedangkan menurut Hennink (2020), penelitian kualitatif adalah fenomena dalam konteks, menjelaskan keyakinan dan perilaku, mengidentifikasi proses, dan memahami konteks pengalaman masyarakat. Agar memaksimalkan penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif untuk membahas bagaimana dampak AUKUS terhadap hubungan diplomatik Tiongkok dan Australia di bidang ekonomi (Hendrarso, 2022; Ulung, 2023).

Pada metode kualitatif, proses penelitian yang berkesinambungan maka tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dapat dilakukan secara bersama-sama selama proses penelitian. Pada penelitian ini pengolahan data tidaklah harus mengolah data setelah data diperoleh terlebih dahulu hingga selesai, namun dapat dilakukan saat masih atau sedang mengumpulkan data sembari mengolah data. Pada metode ini, peneliti memperoleh data dengan diikuti pengolahan dan analisis data secara bersamaan. Jika data yang dimiliki kurang, maka peneliti dapat kembali mencari data atau variabel kembali untuk melengkapi kekurangannya lalu dikelola kembali (Hendrarso, 2022).

Fokus penulisannya, penulis akan terfokus kepada dinamika-dinamika hubungan diplomatik antara Australia dan Tiongkok, terutama di bidang perekonomian kedua negara. Untuk sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu terdiri dari berbagai sumber seperti buku, majalah, karya tulis ilmiah, dan dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah baik secara cetak atau melalui internet. Sedangkan teknik pengumpulan data, penulis menggunakan studi literatur (studi kepustakaan). Studi literatur adalah pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber data sekunder (Raihan, 2017).

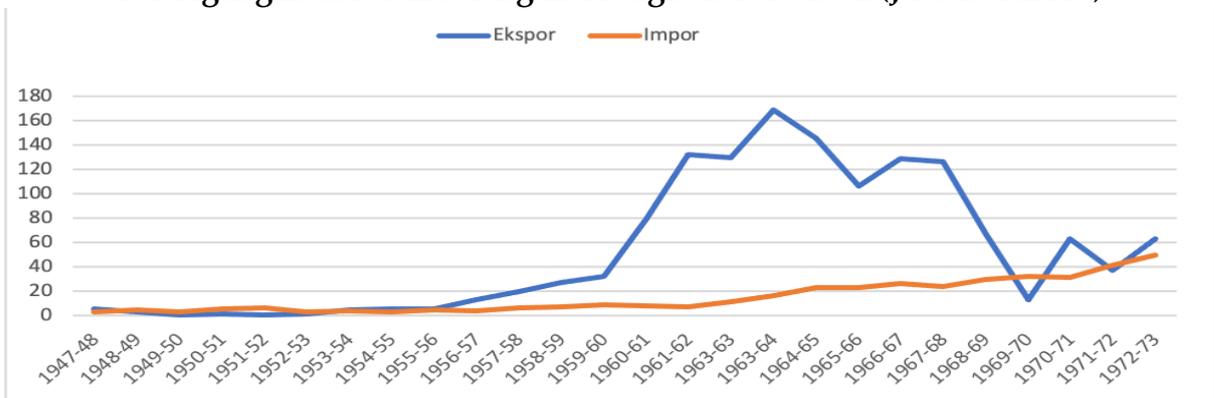
DISKUSI

Hubungan Bilateral Tiongkok dan Australia

Pada awal hubungannya, Republik Rakyat Tiongkok secara resmi diproklamasikan pada tahun 1949. Namun Australia di bawah Ben Chifley (1945-1949) dibuat bingung untuk mengakui Tiongkok atau tidak. Menteri Luar Negeri Australia Herbert Evatt telah mengisyaratkan keuntungan mengakui Tiongkok. Namun hal tersebut gagal terjadi setelah Chifley digantikan. Para perdana menteri selanjutnya menganut anti-komunis. Barulah di bawah era William McMahon atau pada tahun 1971 dengan disahkannya Resolusi Majelis PBB 2758 tahun 1971 dan masuknya Tiongkok diikuti diusirnya Taiwan dari PBB, di mana Australia ingin menganut 'Dua Tiongkok' (Wang, 2012).

Fakta lainnya adalah Australia dan Tiongkok telah melakukan misi perdagangan sebelum diakuinya Tiongkok oleh Australia. Perkembangan perdagangan keduanya terus tumbuh tanpa hubungan diplomatik politik (Lihat Grafik 2). Mengutip tulisan Fung (1982), Australia memiliki kebijakan untuk mengendalikan barang-barang ekspor. Pertama, daftar barang yang dilarang diekspor sama sekali. Kedua, barang-barang yang perlu izin ekspor. Barang-barang ekspor tersebut berada di bawah pengawasan dan izin kementerian luar negeri serta bea dan cukai (Wang, 2012).

Grafik 2.
Perdagangan Australia dengan Tiongkok 1947-1972 (Juta Dolar AS)



Sumber: (Wang, 2012)

Setelah Australia dan Tiongkok memiliki hubungan diplomatik, hubungan keduanya difokuskan di beberapa bidang, terutama di bidang perekonomian. Kedua negara telah berkembang menjadi mitra dagang yang erat. Pertumbuhan pesat Tiongkok telah menciptakan permintaan yang kuat dan prospek pasar untuk pasar Australia. Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, dan Australia adalah sumber ekspor terbesar ke-10 dan impor terbesar kelima Tiongkok. Australia juga membangun beberapa perjanjian-perjanjian perdagangan dan kerja sama dengan Tiongkok, seperti *China–Australia Free Trade Agreement (ChAFTA)* pada tahun 2015 dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* pada 2022 (Wu, 2022; Observatory of Economic Complexity, 2023).

Menurut *Observatory of Economic Complexity (OEC)*, selama 26 tahun terakhir ekspor Tiongkok ke Australia meningkat pada tingkat tahunan sebesar 13,7% dari 2,5 miliar dolar AS pada tahun 1995 menjadi 70 miliar dolar AS pada 2011. Pada periode yang sama, ekspor Australia ke Tiongkok juga meningkat pada tingkat tahunan, yaitu sebesar 17,2%, dari 2,24 miliar dolar AS pada tahun 1995 menjadi 138 miliar dolar AS pada 2021 (Wu, 2022; Observatory of Economic Complexity, 2023).

Sejak Tiongkok membuka dirinya dari kebijakan isolasionis pada akhir 1970-an, Presiden Tiongkok sebelumnya Deng Xiaoping menuturkan dengan membangun kekuatan produktif, negara secara bertahap menjadi kuat dan sejahtera. Maka tujuan diplomasi Tiongkok adalah menciptakan lingkungan internasional yang damai dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi Tiongkok dengan diikuti membuka diri terhadap dunia luar. Bahkan di era Xi Jinping masih terfokus kepada kebijakan tersebut namun diikuti dengan diplomasi publik. Dampak dari kebijakan tersebut tentu telah terlihat. Pada 1979-2010 pertumbuhan rata-rata PDB tahunan Tiongkok mencapai 9,91% di mana berbarengan dengan reformasi ekonomi. Sedangkan Amerika Serikat 1970-2010 pertumbuhannya 3,2% (Lee, 2019; Ghosh, 2019; Macrotrends.net, n.d.; Yang, 2017)

Reformasi ekonomi, pertumbuhan manufaktur, investasi, dan urbanisasi meningkat di Tiongkok. Tentu ini menciptakan peningkatan permintaan pasar industri Tiongkok. Untuk itu, Australia ditempatkan sebagai negara yang mampu memenuhi permintaan-permintaan tersebut. Menurut Tiongkok, Australia memiliki pasokan bijih besi, batu bara, dan wol yang kaya dan dibutuhkan oleh industri Tiongkok. Serta, letak geografis Australia (dekat dengan laut) dan terdekat dengan Tiongkok menjadikan biaya transportasinya menjadi tidak mahal (tidak sampai 10% dari biaya barangnya) (The World Bank, 2023; Parliament of Australia, n.d.).

Kepesatan perkembangan industri Tiongkok dapat terlihat dalam lima tahun terakhir termasuk pada masa pandemi dan memanasnya hubungan kedua negara. Pada tingkat pertumbuhan PDB Tiongkok, menurut Bank Dunia, tahun 2018 tingkat pertumbuhan PDB Tiongkok naik sebesar 6,7%, tahun 2019 naik sebesar 6%, tahun 2020 naik sebesar 2,2%, tahun 2021 naik sebesar 8,4%, dan pada 2022 naik sebesar 3% (Hidayat, 2021; The World Bank, 2023).

Pada kunjungan kenegaraannya di Australia pada November 2014, Presiden Tiongkok Xi Jinping berpidato di hadapan Parlemen Australia selama kunjungannya ke Canberra. Xi membahas isu perdagangan yaitu menyelesaikan substansial negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara Tiongkok dan Australia. Xi juga secara resmi mengundang Australia dan negara kawasan Oseania lainnya untuk berpartisipasi dalam BRI. Lalu pada kunjungan Turnbull ke Tiongkok pada 2016, Xi menyatakan harapannya agar kedua negara dapat menyelaraskan BRI Tiongkok dengan rencana *Northern Development* milik Australia (The Straits Times, 2014; Collinson & Nieuwenhuizen, 2007; Zhang, 2021).

Menteri Perdagangan Australia Steven Ciobo menyatakan bahwa Pemerintah Australia mendukung tujuan BRI dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Asia-Pasifik. Pada kedua masa pemerintahan perdana menteri Australia, yaitu pada Malcolm Turnbull maupun Scott Morrison awalnya sama-sama menyambut baik

keberadaan BRI tersebut. Menurut Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne terdapat dua dokumen yang telah ditandatangani pada 2018 dan 2019 berisikan MoU dan perjanjian kerangka kerja antara Victoria dengan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok (Laurenceson & Collinson, 2019; France24, 2021).

Awal Ketegangan Hubungan Politik Tiongkok dan Australia

Menurut Australia-Tiongkok Relations Institute (ACRI), pada Oktober 2018 negara bagian Victoria telah menandatangani MoU dengan Tiongkok mengenai kerjasama BRI. Tetapi, Canberra tidak mendukung perjanjian tersebut. Baik perdana menteri Australia, menteri luar negeri Australia, dan menteri perdagangan Australia sama-sama merespons bahwa mereka tidak mendukung dan perlu meninjau ulang implikasinya bagi Australia baik ekonomi atau politik (Laurenceson & Collinson, 2019; VOA Indonesia, 2021; Dziedzic, Pemerintah Australia Batalkan Perjanjian Proyek Infrastruktur China di Negara Bagian Victoria, 2021; Callanan, 2021). Menteri Luar Negeri Australia Payne, berkata:

“I consider these four arrangements to be inconsistent with Australia’s foreign policy or adverse to our foreign relations in line with the relevant test in Australia’s Foreign Relations (State and Territory Arrangements) Act 2020.” (Australian Minister for Foreign Affairs, 2021)

Kebijakan luar negeri yang dimaksud Payne, merupakan implementasi Skema Pengaturan Kebijakan Luar Negeri (*Australia’s Foreign Arrangements Scheme*) dari RUU Hubungan Luar Negeri (Pengaturan Negara dan Wilayah) Australia tahun 2020 atau *Australia’s Foreign Relations (State and Territory Arrangements) Bill 2020*. Jadi, kebijakan ini mengharuskan negara bagian, pemerintah daerah, dan universitas negeri Australia melapor kepada Menteri Luar Negeri Australia tentang kerja sama luar negeri yang ada dan yang diusulkan, memastikan dampak bagi Australia, dan kebijakannya harus sejalan dengan kebijakan luar negeri Australia (Minister for Foreign Affairs of Australia, 2020)

Tiongkok sebenarnya memiliki peran besar dalam hal ekonomi di kawasan regional Indo-Pasifik. Selain melakukan komitmen-komitmennya yang telah dijelaskan sebelumnya, kebangkitan Tiongkok juga telah menghasilkan pergeseran keseimbangan kekuatan yang baru di Indo-Pasifik. Selain itu, Tiongkok juga sedang 'meramaikan' kembali klaimnya pada beberapa dekade ini, terhadap Laut Tiongkok Selatan. Akibatnya sebagian besar negara-negara di kawasan Indo-Pasifik merasa terancam dalam segi keselamatan, keamanan, dan stabilitas.

Pada 2015, Australia pernah mengkritik Tiongkok atas klaim teritorial di Laut Tiongkok Selatan. Menurut laporan ABC News pada 2015, Turnbull menyatakan bahwa tindakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan adalah *'pushing the envelope'* (ungkapan menguji atau memperluas batas-batas) dan seharusnya tidak mengganggu keharmonisan kawasan. Ia juga mengatakan pemerintah perlu untuk mengambil pendekatan diplomatik dan seimbang ke Tiongkok. Kritik yang ditunjukkan Turnbull adalah langkah berani dan komitmen Australia terhadap penyelesaian sengketa di kawasan secara damai dan sesuai hukum internasional (Henderson, 2015; Raditio, 2016).

Hubungan Tiongkok dan Australia makin memburuk pada saat pandemi COVID-19. Pada April 2020, Morrison dan Menteri Luar Negerinya, Marise Payne, menyerukan untuk dilakukannya penyelidikan internasional yang independen oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Mereka menyatakan, WHO perlu 'inspektur senjata'. Inspektur senjata yang dimaksud adalah pejabat di bawah PBB yang berwenang memeriksa potensi lokasi penelitian atau peralatan militer dan menilai kepatuhan terhadap Resolusi PBB 1540 tentang senjata biologis. Hal tersebut dilakukan akibat kekhawatiran cara Tiongkok menangani tahap awal wabah di Kota Wuhan, Tiongkok. Tiongkok menanggapinya sebagai 'serangan politik' dan menganggap Australia sebagai 'kaki tangan' Amerika Serikat. Duta Besar Tiongkok untuk Australia, Cheng Jingye telah memperingatkan potensi pemboikotan konsumen

terhadap produk-produk dan program atau universitas Australia (Worthington, 2020; Karp & Davidson, 2020; Farr, 2020; Walsh, 2021).

Pasca kejadian tersebut, mengutip dari *ABC News*, Tiongkok menjatuhkan sanksi terhadap komoditas impor Australia tanpa batas waktu. Komoditas besar yang terkena seperti: jelai, kayu, lobster, kapas, dan batu bara, termasuk pembatasan tarif, penangguhan impor, dan penundaan bea cukai yang lama. Perwakilan Australia untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), George Mina menuduh Tiongkok melanggar aturan perdagangan global dan merusak sistem perdagangan multilateral yang selama ini menjadi sandaran seluruh anggota WTO. Mina juga menuduh bahwa Tiongkok melakukan pembuatan impor barang Australia atas pembalasan atas perselisihan politik (Dziedzic, 2021).

Lalu, Jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin mendesak Canberra untuk meninggalkan mentalitas Perang Dingin, prasangka ideologis, dan menghentikan 'tindakan gila' terhadap kerja sama Tiongkok dan Australia. Tiongkok memutuskan untuk memblokir impor sebagian besar barang Australia pada 2020. Bahkan para menteri Tiongkok juga menolak untuk menerima telepon dari rekan-rekan Australia mereka. Di sisi lain, Menteri Perdagangan Australia, Dan Tehan, menyampaikan bahwa pihak Australia terbuka untuk mengadakan dialog dan terlibat di tingkat menteri (McDonald & McGuirk, 2021).

Pembentukan Kerja Sama Teknologi Pertahanan AUKUS

Kerja sama teknologi pertahanan AUKUS dibentuk pada 15 September 2021 oleh Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Pembentukannya diumumkan melalui konferensi pers virtual yang dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Pembentukan AUKUS adalah kebijakan yang diputuskan oleh 'negara hegemoni' untuk menjadikan strategi ancaman kepada Tiongkok. Artinya, negara-

negara anggota AUKUS tidak ingin Tiongkok mendominasi urusan internasional, maka mereka membentuk kerja sama ini untuk menyeimbangkan kekuatan (Bowman & Montgomery, 2021; Utami, 2022).

Sebelumnya, baik Australia dan Amerika Serikat sama-sama terancam oleh kekuatan Tiongkok. Kebangkitan Tiongkok yang diikuti dengan perkembangan pertahanannya memicu kecemasan bagi Amerika Serikat. Australia juga merasa terancam karena kehadiran kapal-kapal Tiongkok yang pernah terlacak berada di lepas pantai barat, utara, dan timur Australia. Lalu, disisi lain proses pembentukan AUKUS dipengaruhi oleh identitas dan kepentingan. Pada identitas, mengacu pada gagasan bersama antara bangsa *Anglo-Saxon* (termasuk Kanada dan Selandia Baru). Namun, Selandia Baru tidak bergabung AUKUS karena komitmen non-proliferasi sedangkan Kanada karena tidak berkontribusi pada program kapal selam nuklir. (Darmawan & Karmilawaty, 2023; Korwa & Wambrau, 2023).

Lalu pada kepentingan aliansi, Amerika Serikat ingin memperkuat hegemoninya di Indo-Pasifik dan menyeimbangkan dominasi Tiongkok. Sedangkan Inggris bertujuan untuk menjadi negara Eropa pertama yang meningkatkan kerja sama aliansi di Indo-Pasifik setelah Brexit. Lalu Australia bersedia memodernisasi kemampuan militernya dan menegaskan komitmennya sebagai sekutu yang dapat diandalkan di masa depan (Korwa & Wambrau, 2023).

Kehadiran AUKUS tentu menjadikan Tiongkok makin terancam posisinya secara langsung. Maka dari itu, Tiongkok merespons bahwa kehadiran AUKUS akan berdampak kepada geopolitik Indo-Pasifik dan menyatakan AUKUS merupakan produk 'mentalitas perang dingin' antara Canberra, London, dan Washington yang merusak perdamaian, stabilitas regional, dan berpotensi mengakibatkan perlombaan senjata. (Cuong, Tien, & Tai, 2023; Martin, 2021).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin berkata:

"Their explanation is just a pale and weak response to the concerns of the regional countries and the international community." (ABC News, 2021)

Wang juga menambahkan:

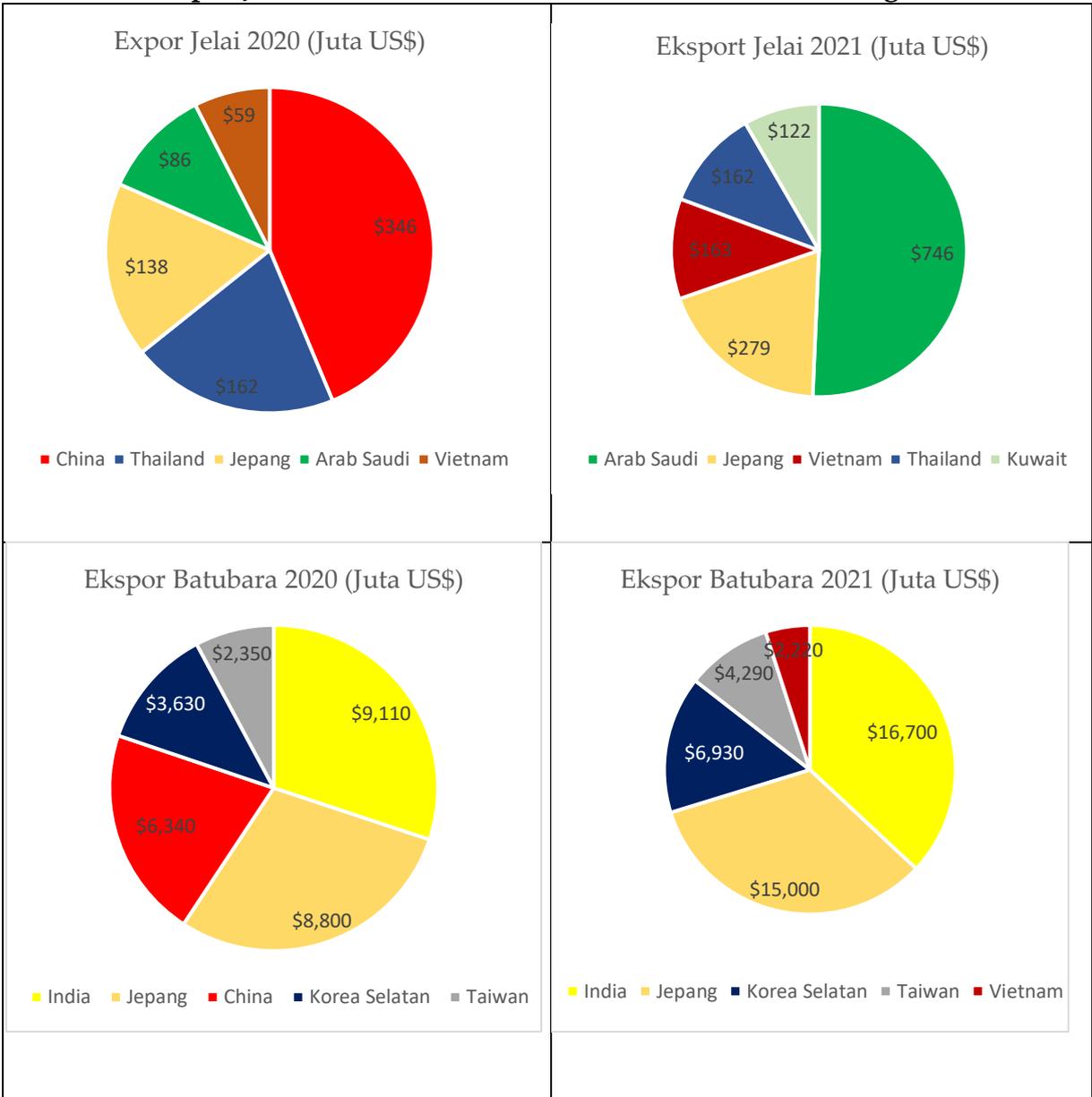
"We urge the United States to discard the Cold War mentality, zero-sum game mindset and ideological prejudice, correctly view China-U.S. relations, stop those negative words and deeds, and work with China to move bilateral relationship back onto the right track of coordination, cooperation, and stability." (ECNS.CN, 2020)

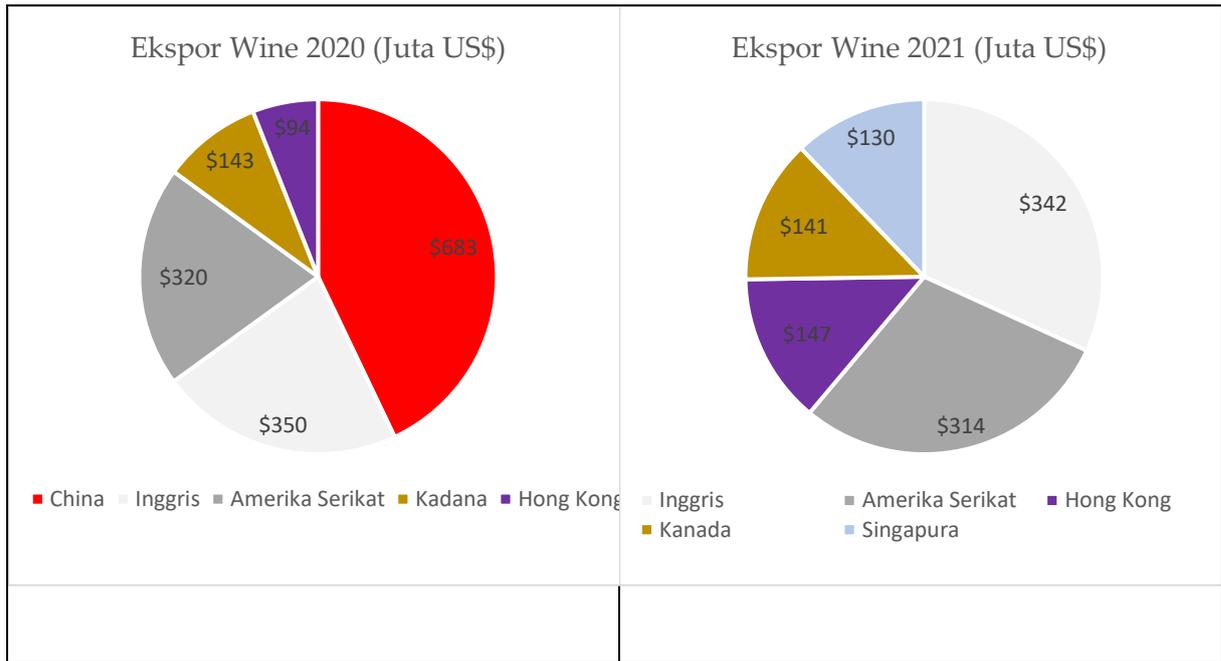
Implikasi Pembentukan AUKUS terhadap Perdagangan Australia dan Tiongkok

Direktur penelitian *Perth US-Asia Centre* Dr. Jeffrey Wilson mengatakan Tiongkok telah menerapkan sanksi perdagangan ke hampir semua sektor utama Australia yang di mana Tiongkok sendiri telah mampu untuk tidak mengimpor barang-barang dari Australia. Menurutnya juga target potensial selanjutnya selain perdagangan adalah mahasiswa internasional dan pariwisata. Namun, untuk ekspor bijih besi dari Australia ke Tiongkok tetap normal karena Tiongkok membutuhkannya untuk kepentingan sistemiknya (Martin, 2021).

Sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwa hubungan ekonomi Tiongkok dan Australia berada di level terendah sejak tahun 2021, yaitu sejak Tiongkok melakukan penangguhan terhadap beberapa komoditas dari Australia, seperti jelai, batu bara, dan minuman anggur. Hingga saat ini, Tiongkok belum menormalisasi akses impor komoditas tersebut dari Australia sejak tahun 2021. Masih belum ada informasi mengenai kapan atau niat pihak Tiongkok untuk menormalisasi akses impornya dengan Australia. Komoditas yang dimaksud adalah komoditas yang besar bagi sektor ekspor Australia seperti jelai, minuman anggur, dan batu bara.

Grafik 3.
Ekspor Jelai, Batu Bara, dan Wine dari Australia ke Tiongkok





Sumber: (Observatory of Economic Complexity, 2023)

Pada 2020, Australia masih bisa mengekspor batu bara ke Tiongkok. Nilai ekspornya ialah 6,3 miliar dolar AS. Akan tetapi, pada tahun 2021, ekspor batu bara dari Australia ke Tiongkok terhenti total karena Tiongkok menanggihkan akses ekspor batu bara tersebut setelah Australia tergabung ke dalam AUKUS. Pembentukan AUKUS juga berdampak pada akses ekspor jelai dan minuman anggur dari Australia ke Tiongkok. Sebelum AUKUS berdiri, Australia bisa mengekspor jelai ke Tiongkok. Pada tahun 2020, nilai ekspor jelai dari Tiongkok ke Australia mencapai 346 juta dolar AS. Namun, ekspor jelai terhenti pada 2021. Seperti jelai, ekspor minuman anggur dari Australia ke Tiongkok juga terhenti pasca pembentukan AUKUS. Pada 2020, Australia bisa mengekspor minuman anggur dengan nilai ekspor sebesar 683 juta dolar AS. Namun, pada 2021, ekspor minuman anggur setop. Baik minuman anggur, jelai, dan batu bara memiliki nilai yang tinggi di Tiongkok. Oleh karena itu, penanggihan akses ekspor tiga komoditas ini berdampak pada ekonomi Australia.

Kebijakan penanggihan akses ekspor yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Australia tidak lepas dari kepentingan nasional Tiongkok. Kepentingan nasional

sangat menentukan setiap keputusan sebuah negara. Pada perspektif neorealisme, mereka menekankan peran kekuatan dan keamanan dalam sebuah perilaku negara. Namun, untuk mengejar kekuatan dan keamanan tersebut digunakanlah konsep kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan cara komunikasi dan mengevaluasi melalui kebijakan luar negeri dalam mempertahankan negaranya atau negara lain.

Kedaulatan Tiongkok merupakan salah satu kepentingan inti dari Tiongkok. Menurut dokumen "*China's Peaceful Development 2011*", kepentingan inti Tiongkok terdiri dari; kedaulatan negara, keamanan nasional, integritas wilayah, reunifikasi nasional, sistem politik Tiongkok yang diterapkan oleh Konstitusi dan stabilitas sosial secara keseluruhan, perlindungan dasar untuk memastikan pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan. Hal ini juga telah diperkuat atas kecurigaan Tiongkok terhadap Australia sebenarnya telah terlihat pada dokumen *China's Natinal Defense in the New Era* (2019). Menurut Tiongkok, Australia sedang mencari peran yang lebih besar dalam urusan keamanannya, yaitu memperkuat aliansi militer dengan Amerika Serikat untuk terlibat dalam di Asia-Pasifik. (Zhaokui, 2014; State Council The People's Republik of China, 2011; State Council Information Office of the People's Republik of China, 2019).

Penulis berpendapat bahwa bergabungnya Australia menjadi anggota AUKUS bersama Inggris dan Amerika Serikat tentu itu sudah menjadi sebuah ancaman besar bagi kepentingan nasional Tiongkok terutama terhadap kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayahnya. Jika Tiongkok tidak melakukan ancaman kembali terhadap Australia, tentu kepentingan nasional Tiongkok yang selama ini telah berjalan akan tidak menguntungkan bagi Tiongkok. Maka Tiongkok melakukan penangguhan barang-barang komoditas ekspor terbesar dari Australia.

KESIMPULAN

Pada artikel ini, penulis menemukan bahwa hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Australia telah memanas sebelumnya, yaitu telah terjadi sejak masa pandemi Covid-19 atau tahun 2021 akibat ketidakpercayaan Canberra dengan Tiongkok terhadap penyelidikan tahap awal penyebaran virus Covid-19 di Wuhan. Jadi, pihak Tiongkok pada tahun 2021, telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi tarif impor dan menanggihkan beberapa barang-barang impor Australia seperti, batu bara, jelai, dan minuman anggur sejak Maret 2021. Jika berfokus masa pasca Australia bergabung dengan AUKUS, yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut jika dianalisis berdasarkan teori neorealisme milik Kenneth Waltz merupakan tindakan untuk mempertahankan kepentingan nasional Tiongkok. Neorealisme pada kasus ini bertindak untuk memaksimalkan keamanan dan kepentingan nasional mereka, dan penanggihan impor merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pada kasus ini, kepentingan nasional yang dimaksud adalah yang menjadi poin terpenting Tiongkok, yaitu kedaulatan negara, keamanan nasional, dan integritas wilayah yang semakin terancam dengan kemunculan dan ikutnya Australia menjadi anggota AUKUS.

BIBLIOGRAFI

- Australian Bureau of Statistics. (2020, September 03). *Australia's trade in goods with China in 2020*. Retrieved 08 01, 2023, from ABS: <https://www.abs.gov.au/articles/australias-trade-goods-china-2020#cite-window2>
- Australian Government. (2022, Juli). *China country brief: Bilateral relation*. Retrieved 07 30, 2023, from Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade: <https://www.dfat.gov.au/geo/china/china-country-brief>
- Bakry, U. S. (2019). *Dasar-dasar Hubungan Internasional* (2nd ed.). Jakarta: Prenadamedia.
- Bo, Z. (2014, Februari 11). *The String of Pearls and the Maritime Silk Road*. Retrieved 07 29, 2023, from China & US Focus: Foreign Policy:

<https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/the-string-of-pearls-and-the-maritime-silk-road>

- Bowman, B., & Montgomery, M. (2021, September 27). *Defense One: Ideas*. Retrieved 09 19, 2023, from AUKUS: Good Goals, Bad Implementation: <https://www.defenseone.com/ideas/2021/09/aukus-good-goals-bad-implementation/185652/>
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory* (1st ed.). New York: Palgrave Macmillan.
- Callanan, T. (2021, April 22). *What is China's Belt and Road Initiative and what were the four deals the federal government tore up*. Retrieved 08 31, 2023, from ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2021-04-22/what-was-in-victoria-belt-and-road-deal-with-china/100086224>
- Collinson, E., & Nieuwenhuizen, S. v. (2007, Desember). Australia and the Belt and Road Initiative: A survey of developments 2013-November 2017. Broadway, New South Wales, Australia. Retrieved 08 16, 2023, from https://www.uts.edu.au/sites/default/files/201712%20Collinson%20and%20van%20Nieuwenhuizen_Australia%20and%20the%20Belt%20and%20Road%20Initiative%20-%20A%20survey%20of%20developments%202013-September%202017.pdf
- Cuong, T. P., Tien, N. H., & Tai, V. P. (2023). The role of the AUKUS alliance in conterbalancing China. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 4(1), 51-58.
- Darmawan, A. Z., & Karmilawaty, R. S. (2023). Proposal Nuclear Naval Propulsion dari Indonesia untuk PBB Sebagai Respons atas Dinamika Keamanan di Indo-Pasifik. *BHUVANA: Journal of Global Studies*, 1(1), 39-59. doi:<https://doi.org/10.59408/bjgs.v1i1.46>
- Dev, A. (2022, April 27). *China's Rise and the Implications for the Indo-Pacific*. Retrieved 07 29, 2023, from Obsever Research Foundation: Expert Speak: <https://www.orfonline.org/expert-speak/chinas-rise-and-the-implications-for-the-indo-pacific/>
- Dziedzic, S. (2021, Oktober 20). *Australia attacks China's policy of economic punishment at the WTO, accuses it of contravening rules*. Retrieved 08 24, 2023, from ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2021-10-21/australia-wto-blasts-china-economic-punishment-retaliation/100555410>
- Dziedzic, S. (2021, April 23). *Pemerintah Australia Batalkan Perjanjian Proyek Infrastruktur China di Negara Bagian Victoria*. Retrieved 08 31, 2023, from ABC News: Bahasa Indonesia: <https://www.abc.net.au/indonesian/2021-04-23/australia-batalkan-proyek-infrastruktur-china/100091320>

-
- Farr, M. (2020, April 22). *Australian politics: Australian PM pushes for WHO overhaul including power to send in investigators*. Retrieved 08 24, 2023, from The Guardian: <https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/22/australian-pm-pushes-for-who-overhaul-including-power-to-send-in-investigators>
- France24. (2021, April 21). *france24.com: Live News*. Retrieved 09 22, 2023, from Australia cancels state's Belt and Road deal with China`: <https://www.france24.com/en/live-news/20210421-australia-cancels-state-s-belt-and-road-deal-with-china>
- Ghosh, I. (2019, Oktober 12). *The People's Republic of China: 70 Years of Economic History*. Retrieved 08 28, 2023, from Visual Capitalist: History: <https://www.visualcapitalist.com/china-economic-growth-history/>
- Grant, S. (2022, November 6). *China's rise supercharged Australia's economy. But now that's unravelling, and the Albanese government faces a serious challenge*. Retrieved 08 22, 2023, from ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2022-11-06/china-rise-australia-economic-growth-albanese-hawke-lesson/101615854>
- Henderson, A. (2015, September 21). *Malcolm Turnbull says China 'pushing the envelope' in South China Sea*. Retrieved 08 24, 2023, from ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2015-09-21/china-is-pushing-the-envelope-in-south-china-sea-turnbull/6793102>
- Hendrarso, E. S. (2022). Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar. In B. Suyanto, & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (3rd ed., pp. 165-175). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hidayat, A. N. (2021, Juli 31). *Meneropong Hubungan Masa Depan China-Australia*. Retrieved 01 08, 2023, from publika.rmol.id: <https://publika.rmol.id/read/2021/07/31/498715/meneropong-hubungan-masa-depan-china-australia>
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. (D. Suryadipura, & P. Suyatiman, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karp, P., & Davidson, H. (2020, April 29). *Coronavirus: China bristles at Australia's call for investigation into coronavirus origin*. Retrieved 08 24, 2023, from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/29/australia-defends-plan-to-investigate-china-over-covid-19-outbreak-as-row-deepens>
- Keohane, R. O. (1988). Neorealism and Neoliberalism. *World Politics*, 40(2), 235-251. doi:10.2307/2010363
- Korwa, J. R., & Wambrauw, M. S. (2023). A Constructivist Analysis of the Establishment of the AUKUS Security Pact and its Implications for Regional Stability in the Indo-Pacific. *Jurnal Hubungan Internasional*, 16(1), 19-35.

-
- Kuo, M. A. (2018, Januari 25). *The Origin of 'Indo-Pacific' as Geopolitical Construct: Insights from Gurpreet Khurana*. Retrieved 07 2023, 2023, from The Diplomat: Trans-Pasific View: <https://thediplomat.com/2018/01/the-origin-of-indo-pacific-as-geopolitical-construct/>
- Laurenceson, J., & Collinson, E. (2019, April 25). *Australia and The Belt and Road Initiative*. Retrieved 08 16, 2023, from Australia-China Relation Institute: Research / ACRI Opinion: <https://www.australiachinarelations.org/content/australia-and-belt-and-road-initiative>
- Lee, Y. N. (2019, September 23). *Here are 4 charts that show China's rise as a global economic superpower*. Retrieved 08 28, 2023, from CNBC: China Economy: <https://www.cnbc.com/2019/09/24/how-much-chinas-economy-has-grown-over-the-last-70-years.html>
- Macrotrends.net. (n.d.). *U.S. GDP Growth Rate 1961-2023*. Retrieved 08 28, 2023, from www.macrotrends.net: Economy: GDP Growth Rate: <https://www.macrotrends.net/countries/USA/united-states/gdp-growth-rate>
- Martin, L. (2021, September 17). *Experts say China trade sanctions over AUKUS deal unlikely, but flag long-term concerns*. Retrieved 08 30, 2023, from ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2021-09-17/australia-aukus-subs-deal-unlikely-result-trade-sanctions/100469936>
- McDonald, J., & McGuirk, R. (2021, Mei 6). *China suspends economic dialogue with Australia*. Retrieved 08 25, 2023, from The Associated Press: <https://apnews.com/article/china-australia-financial-markets-business-38uZAEr4UA7uUYqgCEsBEDJJRsnnS2dUt>
- Minister for Foreign Affairs of Australia. (2020). *The Parliament of the Commonwealth of Australia 2019-2020: Senate*. Retrieved 09 22, 2023, from Australia's Foreign Relation (State and Territory Arrangements) Bill 2020: https://www.foreignarrangements.gov.au/sites/default/files/2020-12/Australias_Foreign_Relations_State_and_Territory_Arrangements_Bill_2020.pdf
- Morgenthau, H. J., & Thomson, K. W. (2010). *Politik Antarbangsa* (4th ed.). (S. Maimoen, A. M. Fatwan, & C. Sudrajat, Trans.) Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Observatory of Economic Complexity. (2023, May). *oec.world*. Retrieved 08 15, 2023, from [Bilateral Countries: China-Australia: https://oec.world/en/profile/bilateral-country/chn/partner/aus](https://oec.world/en/profile/bilateral-country/chn/partner/aus)
- Parliament of Australia. (n.d.). *About Parliament*. Retrieved 08 14, 2023, from Australia's economic relationships with China:

-
- https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BriefingBook44p/China
- Pedrason, R. (2021). Indo-Pasifik dalam perspektif geopolitik dan geostrategi. *Journal homepage*, 7(1), 88-95. doi: <https://doi.org/10.29210/02021830>
- Raditio, K. (2016, April 18). *Opinion: Between the South China Sea and human rights*. Retrieved 08 24, 2023, from The University of Sydney: <https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2016/04/18/between-the-south-china-sea-and-human-rights0.html>
- Raihan. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta.
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*. (Y. S. Hayati, Ed.) Depok: Rajawali Pers.
- State Council Information Office of the People's Republic of China. (2019). *China's National Defense in the New Era*. Beijing: State Council Information Office of the People's Republic of China. Retrieved 08 29, 2023, from https://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201907/24/content_WS5d3941ddc6d08408f502283d.html
- State Council The People's Republik of China. (2011). *China's Peaceful Development*. Beijing: Information Offie of the State Council The People's Republik of China. Retrieved 08 28, 2023, from https://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2014/09/09/content_281474986284646.htm
- The Straits Times. (2014, November 19). *Full text of Chinese President Xi Jinping's address to Australia's Parliament*. Retrieved 08 16, 2023, from The Straits Times: <https://www.straitstimes.com/asia/australianz/full-text-of-chinese-president-xi-jinpings-address-to-australias-parliament>
- The World Bank. (2023, April 20). Retrieved 08 14, 2023, from The World Bank in China: <https://www.worldbank.org/en/country/china/overview>
- The World Bank. (2023). *GDP Growth (Annual %) - China*. Retrieved 08 15, 2023, from The World Bank: Data: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2022&locations=CN&start=2010&view=chart>
- Ulung, A. K. (2010, Oktober). Terbentuknya Pemahaman Intersubjektif Terhadap Kemajuan Cina di Kawasan Asia Pasifik. *Skripsi*.
- Ulung, A. K. (2012). Kompleksitas Keamanan Asia Pasifik dan implikasinya Terhadap Transformasi Komitmen Pertahanan Amerika Serikat Pasca Perang Dingin. *Tesis*.

-
- Ulung, A. K. (2023). Turning Ubud Into UNWTO's Prototype for a World Gastronomic Destination Through Gastrodiplomacy. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 25(1), 1-26. doi:10.7464/global.v25i1.1261
- Utami, S. T. (2022). Keamanan Regional Asia Tenggara Pasca Perjanjian AUKUS dan Implementasinya Pada Ketahanan Wilayah Indonesia. *JURNAL KETAHANAN NASIONAL*, 28(2), 199-221.
- VOA Indonesia. (2021, April 22). *Alasan Kepentingan Nasional, Australia Akhiri Kesepakatan dengan China*. Retrieved 08 31, 2023, from VOA Indonesia: Asia Pasifik: <https://www.voaindonesia.com/a/alasan-kepentingan-nasional-australia-akhiri-kesepakatan-dengan-china-/5862776.html>
- Walsh, M. (2021, Januari 3). *Australia called for a COVID-19 probe. China responded with a trade war*. Retrieved 08 24, 2023, from ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2021-01-03/heres-what-happened-between-china-and-australia-in-2020/13019242>
- Wang, Y. (2012). *Australia-China Relation post 1949: Sixty Years of Trade and Politics*. Burlington: Ashgate Publishing Company.
- Worthington, B. (2020, April 19). *Marise Payne calls for global inquiry into China's handling of the coronavirus outbreak*. Retrieved 08 24, 2023, from ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2020-04-19/payne-calls-for-inquiry-china-handling-of-coronavirus-covid-19/12162968>
- Wu, Y. (2022, December 20). *50 Years of China-Australia Relations: Opportunities and Challenges*. Retrieved 08 15, 2023, from China Briefing: from Dezan Shira and Associates: <https://www.bing.com/search?q=chen+yuming+wikipedia%250d%250a&aqs=edge.7.69i64i450l8.2702560j0j4&FORM=ANAB01&PC=EDGEDB>
- Yadav, A. S. (2022). *Indo-Pasifik: Sebuah Kontruksi Geopolitik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Yang, L. (2017). *China-India Relations in the Contemporary World: Dynamics of national interest and identity*. Abingdon & New York, Britania Raya & USA: Routledge.
- Zhang, D. (2021). The Overland Belt: China's Belt and Road in the Pacific: implementation, motives and prospects. In J. C. Liow, H. Liu, & G. Xue, *Research Handbook on the Belt and Road Initiative* (pp. 254-264). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Zhaokui, F. (2014, Oktober 21). *What Are China's Core Interests?* Retrieved 08 28, 2023, from China & US Focus: Foreign Policy: <https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/what-are-chinas-core-interests-2>